

Era Vuca Menciptakan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Semakin Kompleks

Sri Wahyuni Syukur ^{1*}, Ahmad Budi Sutrisno ²

¹ STAI DDI Maros, Indonesia

² STKIP Andi Matappa, Indonesia

* sriwahyunisyukur123@gmail.com

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kesimpangsiuran informasi, ketidakpastian situasi, serta kegalauan manusia yang membayangi tindakan warga Indonesia, seiring dengan pandemi yang belum berakhir dan tidak bisa diprediksi kapan akan selesai. Kerentanan, ketidakpastian, kompleksitas masalah dan ambiguitas dari berbagai pilihan-pilihan merupakan kondisi yang dijelaskan oleh konsep VUCA. Covid-19 yang telah menjangkiti lebih dari satu juta jiwa di tanah air menimbulkan banyak kehebohan di dalam berbagai ranah; ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dan dengan melakukan analisis data sekunder dari Tweeter serta penyebaran kuesioner ringkas melalui google form kepada 969 responden di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua penulis menemukan bahwa era VUCA memfasilitasi berbagai kerumitan dalam menghadapi Covid-19. Kebijakan kuku dari pemerintah menciptakan jalan ketidakpastian dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang peduli terhadap protokol kesehatan. Artikel ini memberikan sumbangsih gagasan terkait aksi sosial tentang kepedulian tatanan sosial baru, kebersamaan, dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan normal baru.

Keywords: *Era Vuca, Pandemi Covid-19, Tren Data, Twitter*

Pendahuluan

Perayaan besar di penghujung malam tahun 2019 ditandai dengan berbagai kegiatan yang tidak banyak berbeda dengan acara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak lama setelah keributan itu, optimisme mulai meredup wabah yang melanda China dengan cepat menyebar ke beberapa negara tetangga di kawasan Asia dan Eropa dalam beberapa minggu kemudian menginfeksi 198 negara tercatat pada 25 Maret dan terus bertambah hingga 213 negara pada 20 Juni 2020. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi COVID-19 juga berdampak besar pada kehidupan dan dramatis perubahan untuk peradaban yang dapat dilihat dari banyaknya politik, ekonomi, olahraga, pendidikan dan kegiatan sosial budaya lainnya yang ditunda atau bahkan dibatalkan.

Mengglobalisasi COVID-19 menandai bahwa globali-tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, politik tetapi juga wabah penyakit. Coronavirus menyebabkan kelainan di banyak sektor kegiatan di hampir semua negara di dunia (Castells, 2010). Ketika penyebaran wabah di global akan terjadi tidak bisa ditebak, jumlah masyarakat Indonesia yang

terjangkit Covid-19 pada 29 September 2020 melebihi 270.000. Selain publik, ada banyak pejabat negara dan pemerintah yang telah diuji positif: diprakarsai oleh Menteri Perhubungan pada 14 Maret 2020, dan Walikota Bogor, setelahnya Kembali dari luar negeri. Kemudian, banyak perwira senior Lembaga pemerintah, provinsi, kabupaten, dan desa terinfeksi bahkan beberapa dari mereka telah berlalu Jauh.

Meskipun jumlah orang yang terinfeksi oleh COVID-19 di Indonesia meningkat, pembuat kebijakan pada periode pertama wabah membuat tidak terkoordinasi merespon. Pada 9 Maret 2020, Presiden melantik Sekretaris Direktorat Jenderal Penyakit Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan (eselon 2) sebagai juru bicara pemerintah tentang Covid-19 di Indonesia menggantikan peran Menteri Kesehatan dan pejabat negara lainnya yang sering membuat pernyataan yang membingungkan. Selanjutnya, pada 13 Maret telah dibentuk Satgas Penanganan Covid-19 terbentuk. Pemerintah juga membuat sikap ragu-ragu dalam menerapkan protokol kesehatan yang diimbau Oleh WHO pada akhir Januari. Sebaliknya, non-lembaga pemerintah mencoba untuk mengambil tanggung jawab dalam menghadapi wabah sebelumnya. Pada 13-14 Maret yaitu Universitas Indonesia diikuti oleh Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga dan universitas lainnya untuk mengumumkan belajar Jarak Jauh untuk menggantikan kegiatan di kelas. Pada 15 Maret, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai memberikan instruksi ke sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan Studi Jarak Jauh yang ditanggapi dengan menutup sekolah dan mengembalikan siswa dari pesantren. Covid-19 Gugus Tugas Tanggap pada 17 Maret mengeluarkan health Protokol dengan tiga konsep utama: cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial. Ketidakpastian wabah global, uncoor-komunikasi strategis oleh pembuat kebijakan dan eksperimentasi tindakan oleh non-pemerintah institusi menjadi tiga aspek kunci dari COVID-19 situasi di Indonesia yang perlu dikaji lebih lanjut. Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana pandemi mengarah transformasi sosial yang didasari oleh Volatilitas (kerentanan), Ketidakpastian (ketidakpastian), Kompleksitas (kompleksitas) dan Ambiguitas (ambiguitas) dipersingkat sebagai VUCA.

Konsep VUCA pertama kali diperkenalkan oleh Militer Amerika Serikat (AS) pada akhir 1980-an setelahnyavberakhirnya Perang Dingin (McNicol, 1999; Bird, 2018). Ancaman tantangan muncul dari berbagai arah dan dengan berbagai skenario yang terkadang tidak dapat diprediksi secara matematis, tetapi kemunculannya dan efeknya yang merusak harus diatasi. Ini artinya sewaktu-waktu militer AS harus bisa untuk menghadapi tantangan yang semakin meningkat dengan asimetris lawan seperti milisi non-negara dan lain-lain itubdiatur "dengan lancar", terkadang musuh yang dihadapinya adalah "maya". (Kasey, 2018). Topik penting ini dan akademi militer di AS relevan dengan guncangan dalam peradaban kehidupan manusia yang telah dijalani gangguan besar dan digital era yang menjadi tulang punggung aktivitas sehari-hari (Castel, 2010; Fukuyama, 1999). Faktanya, masyarakat dibentuk oleh data besar yang menyebar melalui media social (Boullier, 2017). Terkait, situasi pandemi ini ada contoh bagus tentang VUCA seperti di bawah ini.

Metode

Data dari media sosial dikumpulkan dengan menggunakan workbenchdata.com. Situs web digunakan oleh data jurnalis untuk melacak opini publik di media sosial. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengumpulkan twitter data. Meja kerja sebagai pihak ketiga memfasilitasi akses ke Twitter dengan menautkan twitter peneliti ke permintaan izin di Twitter untuk mengumpulkan data. Twitter lebih terbuka dari Facebook karena beberapa alasan yang membawa orang melalui tagar yang terkait dengan berbagai masalah dan memungkinkan orang untuk terlibat dalam debat yang lebih luas. Twitter juga memudahkan penggunaanya untuk saling mengikuti tanpa harus menambah daftar teman mereka. Twitter adalah juga saat ini satu-satunya media sosial yang menawarkan luas akses ke data besar pada percakapan di Twitter dibanding Facebook dan Instagram. Untuk memetakan dan menganalisis VUCA selama Covid-19 mengamuk, peneliti melakukan studi campuran metode dari berbagai data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 / Covid-19, beberapa peraturan yang tertuang dalam banyak pemberitaan di massa media serta big data tersebar di media sosial dan, juga penelitian kuantitatif singkat.

Secara teknis, data dikumpulkan melalui kata kunci corona OR korona lang: ini berarti semua tweet yang menyebutkan kata-kata ini di Bahasa Indonesia akan dikumpulkan. Meja kerja memiliki keterbatasan dalam bahwa data maksimum yang dikumpulkan adalah 100 ribu baris. Untuk mencapai batas maksimum, peneliti mengatur pengumpulan data setiap 15 menit. Data dikumpulkan dari 1-13 Maret. Jangka waktu ini penting karena pada bulan Maret 2, pemerintah Indonesia mengumumkan yang pertama kasus Covid-19. Ini berarti bahwa jangka waktu ini adalah waktu yang tepat untuk melacak informasi paling awal beredar di Twitter tentang Covid-19 di Indonesia. Data yang terkumpul diolah melalui pengelompokan tweet secara manual beberapa kategori.



Figure 1. Tren Data Twitter

Sebuah survei kuantitatif cepat dilakukan dengan teknik sampel kenyamanan menggunakan formulir Google dan didistribusikan ke jaringan Grup WhatsApp dari 22 September hingga 24 September, yaitu tersebar hampir di seluruh Indonesia yang meliputi, Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Padang, Medan, Makassar, Bali, Aceh, Pontianak, Palangkaraya, Timika dan Wakatobi dengan usia rentang usia 15 - 77 tahun dengan respon 969 rakyat. Untuk mengukur tingkat kepedulian seseorang tentang bahaya pandemi Covid-19, menjadi pertanyaan diberikan dengan ukuran skala Likert yang dimodifikasi menjadi 7 urutan skala rasio: dari "1 sangat tidak setuju hingga "7 sangat setuju. Dua pernyataan berikutnya adalah diserahkan kepada responden dengan ingatan ingatan perasaan responden 3-4 bulan yang lalu dan 5-6 bulan yang lalu. Analisis yang ditampilkan menggunakan perbandingan skor rata-rata.

Hasil

Selain mempengaruhi kesehatan manusia hingga kematian, wabah penyakit di era milenial telah terjadi dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan dunia terhubung dalam jaringan global yang besar peristiwa yang berkembang di negeri ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa pada orang lain, khususnya teknologi informasi dengan semakin berpengaruh media sosial meningkatkan berbagai ketidakpastian di tengah keragu-raguan untuk melakukan aktivitas di tahun depan (Omae, 1990; Castle, 2003). Studi mereka bahwa situasi alarm yang dihasilkan oleh Covid-19 telah berubah menjadi krisis dengan konsekuensi otentik di seluruh dunia (González et al, 2020). Hal itu disebabkan karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti yang terjadi pada banyak orang Indonesia khususnya orang-orang muda berperilaku seperti orang referensi mereka khususnya orang Amerika yang tidak mematuhi protokol Kesehatan (Aziz et al, 2020). Di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya sangat tinggi jumlah orang yang meninggal terkait dengan Covid-19 telah mengakibatkan kuburan menjadi kritis. Sehingga muncul solusi penguburan itu dapat dilaksanakan di pemakaman umum tertentu dengan hanya menyediakan area khusus atau melakukan tumpang tindih sistem penguburan.

Mereka adalah beberapa situasi unik tentang untuk menghentikan pandemi Corona. Seperti yang terjadi di sebaran HIV AID, anak muda yang berpotensi terkena telah disosialisasikan untuk tidak menghindari seks bebas dan penggunaan jarum suntik tanpa izin, tetapi bahaya pandemi tidak mempedulikan mereka (Shintadewi et al, 2017). Meskipun arah transformasi sosial karena Covid-19 menuju masyarakat yang peduli tentang protokol kesehatan, dinamika penularan sedang mengalami situasi yang sangat rumit di proses transformasi sosial dari kehidupan sebelumnya munculnya pandemi.

Keriangsan

Penyakit yang dibawa oleh Covid-19 tidak mempertimbangkan status sosial, tradisi keagamaan, kebugaran tingkatan atau usia seseorang. Pernyataan Tom Hanks dan istrinya bahwa mereka telah terinfeksi oleh Covid-19 13 Maret 2020, di Australia saat syuting film telah menggemparkan dunia. Kemudian, beberapa dunia pemimpin juga positif yaitu Presiden Bolivia

Jeanine Anez pada 9 Juli. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada 5 April, Presiden Brasil, Penjara Bolsonaro pada 7 Juli, Pangeran Charles pada 25 Maret 2020, Penasihat Menteri Luar Negeri Iran. Meninggal dunia yang kemudian meninggal pada 5 Maret 2020 juga sebagai Presiden Honduras pada Selasa 23 Juni. Hebatnya, setelah dikritik oleh banyak negara Presiden AS secara resmi mengundurkan diri dari WHO pada Senin, 6 Juli 2020, dan menyatakan bahwa Amerika menghentikan bantuan rutinnya organisasi di bawah PBB. Truf beralasan bahwa WHO telah gagal dalam menangani pandemi dan menuduh badan kesehatan PBB menjadi "boneka" Cina.

Volatilitas tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan keamanan, tetapi juga status pekerjaan dan mata pencaharian. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkatkan angka pengangguran, dan kemiskinan rate mengalami peningkatan drastis pada pertengahan Agustus. Data mengenai PHK telah melampaui angka 2,1 juta pekerja, meningkatkan angka kemiskinan dari 9,41 menjadi 9,78 persen hanya dalam 6 bulan setelah pandemi pecah. Bahkan 34.100 TKI telah kembali ke tanah air mereka. Jika ditambahkan ke pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan, di sana bisa lebih dari 3,5 juta orang (Kompas.com - 10/08/2020, 06:54 WIB). Data tersebut, dari Tentu saja, memunculkan masalah berikutnya: masalah sosial sedang meningkat.

Ketakpastian

Berbagai hal terkait Covid-19 dan caranya menghadapinya penuh ketidakpastian. Asal dari kuman yang menyebar ke seluruh dunia, membawa tentang perubahan besar dalam kehidupan manusia, tidak mungkin dipastikan asalnya dan juga tujuannya. Berbagai teori dengan rasionalisasinya bermunculan diyakini oleh berbagai kalangan masyarakat: awal spekulasi yang diyakini oleh masyarakat dunia itu terkait dengan sumber virus yang merupakan mutan dari mikroorganisme yang berasal dari hewan liar yang dikonsumsi oleh penduduk Wuhan; bisa dari kelelawar dan bisa berasal dari trenggiling. Kemudian teori konspirasi muncul dengan alasan bahwa kota wuhan yang sudah canggih laboratorium biologi, sedang mengembangkan biologi senjata, bagaimanapun, karena kelalaian, dikembangkan virus lolos keluar. Kemudian teori kontra konspirasi muncul yang menyatakan bahwa itu adalah tentara Amerika yang menghadiri Olimpiade militer di Kota Wuhan di November 2019 yang sengaja membocorkan virus ke menghambat ekonomi dan politik China yang luar biasa pertumbuhan. Spekulasi terus berkembang hingga negara-negara di dunia tidak perlu lagi khawatir tentang di mana virus berasal.

Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan tertinggi tingkat darurat global untuk wabah Covid-19. Saat itu hanya ada 82 kasus virus ini di luar China, dengan 10 kasus terjadi di Eropa dan tidak ada kasus di Amerika Latin atau Afrika. Sejak saat itu, Direktur WHO telah tampil di berbagai televisi media dan melalui jaringan media sosial untuk menyediakan penjelasan tentang bahaya Covid-19 dan menyampaikan protokol kesehatan. Negara di seluruh dunia akan segera memperhatikan seruan WHO dengan cara mereka sendiri dalam mengatasi pandemi. Namun,

beberapa negara telah menolak ide tersebut, seperti di Amerika Serikat dan Jerman. Indonesia memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan bukan istilah Karantina Wilayah oleh menerapkan protokol kesehatan yang disusun oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Namun, ini istilah diganti namanya lebih dari sepuluh kali dengan beberapa alasan dan juga akibat.

Masalah ketidakpastian dimulai dengan menurunnya kredibilitas publik WHO dan kemudian menyebar ke berbagai hal. Dalam empat bulan pertama, pandemi, yang menjadi rujukan berbagai negara di dunia, membantu meningkatkan publik keyakinan bahwa wabah dapat diatasi langsung. Namun, menjelang akhir April, berbagai spekulasi muncul terhadap kesehatan dunia institusi, dengan demikian menghilangkan kepercayaan, khususnya rumor bahwa pejabat WHO sedang menjalankan vaksin bisnis dan terlibat dalam kemunculan dan penyebaran Covid-19. Spekulasi mengenai munculnya virus ini juga memiliki banyak varian; gen mutase dari hewan yang dikonsumsi di Cina seperti kelelawar, senjata biologis yang dikembangkan oleh China, oleh Amerika Serikat dan Israel.

Kebingungan

Kebingungan informasi telah tiba di Tahap yang paling krusial, yaitu bagaimana cara merawatnya terkena penyakit dan obat-obatan untuk mencegahnya. Presiden Brasil dan Presiden AS menyatakan pada 18 April Hydroxy Chloroquine dibawa ke Mencegah Korona. Para pejabat tinggi di Indonesia juga mempromosikan obat malaria ini sebagai Corona Vaksin. Beberapa ide muncul bagaimana mencegah Penyakit Corona seperti penggunaan minyak kayu putih dan lain yang disebar oleh media sosial. Informasi kebingungan disumbangkan secara signifikan oleh media sosial yang telah tumbuh di luar kendali siapa pun. Sebagai peran teknologi digital, yang merupakan wadah untuk kehidupan manusia, saat ini dikenal sebagai informasi Ledakan (Dwivedi, et.al, 2018; Umeozor, 2019).

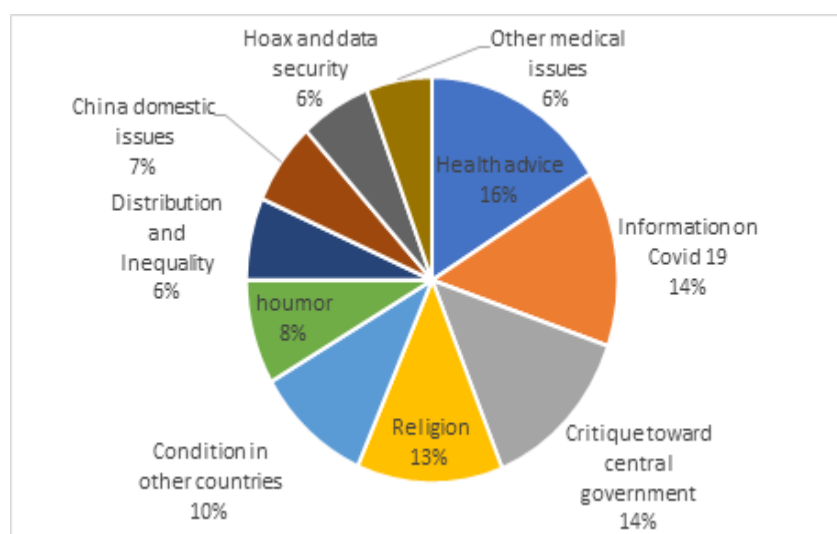


Figure 2. Number of Tweets by Category

DKI Jakarta adalah provinsi pertama yang merespons terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, Apa yang dilakukan pada awal Maret 2020, dipertimbangkan oleh beberapa orang sebagai upaya olehnya untuk menemukan panggung politik Pilpres 2024 dan Dicap terlalu over-bertindak pada virus ini, yaitu Diyakini belum menjadi kasus di Indonesia. Karena itu, pada akhir Maret masih ada banyak orang yang mengikuti kecerobohan negara Pejabat, baik Menteri maupun anggota DPR, dengan membuat lelucon yang meremehkan wabah. Secara umum, persepsi masyarakat terbagi dua; beberapa percaya pernyataan gubernur, dan beberapa mempercayainya pernyataan menolak Covid-19 telah masuk ke negara tersebut.

Apa yang dibagikan orang dalam pikiran mereka di minggu pertama Maret 2020 berat ketidaksadaran bahaya Virus Corona. Jumlah konten tertinggi dari 300 terbanyak tweet yang dibagikan terkait dengan nasihat kesehatan. Meskipun jumlah terbesar, jumlah ini hampir sama sebagai konten terkait informasi Covid-19, kritik pemerintah pusat, agama, dan kondisi di negara-negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa informasi beredar di kalangan pengguna Twitter di awal tahun ini kasus di Indonesia terkait dengan 5 isu tersebut. Sedangkan isu lain yang muncul di “tweet” terkait dengan humor, distribusi obat yang buruk, masalah terkait dengan China, masalah hoax dan keamanan data, seperti serta perbandingan dengan masalah medis lainnya.

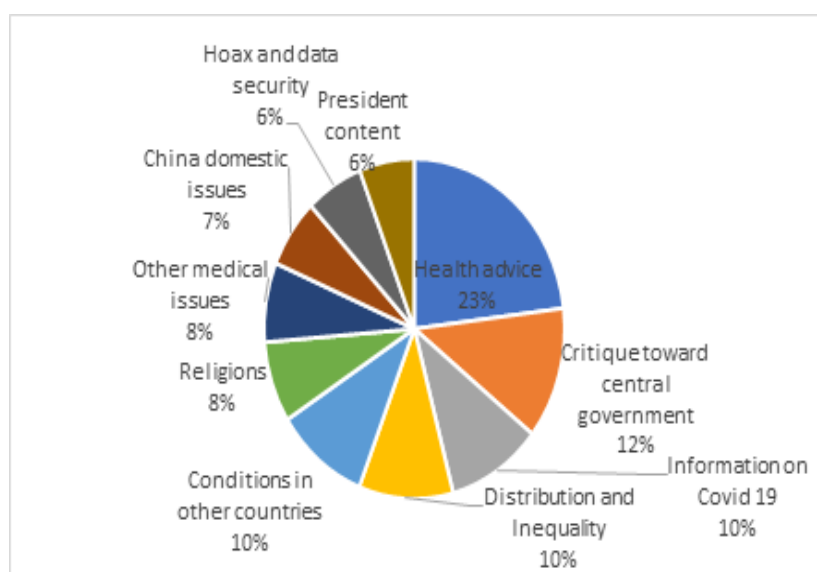


Figure 3. Most shared Tweet by Category

Protokol kesehatan seperti tips menghindari Covid-19, kebanyakan menggunakan hand sanitizer dan masker dibagikan di Twitter. Ini 2 kali lebih banyak dibagikan daripada konten yang mengkritik kebijakan dan pernyataan dari pemerintah pusat menanggapi. Dan 3 lainnya masalah seperti konten yang berisi pembaruan tentang virus ini kasus, konten distribusi APD, dan negara lainnya respon kebijakan adalah sama. Sedangkan jenis lainnya konten jauh lebih sedikit dibagikan. Isi dari Akun Twitter presiden bahkan masuk dalam 10 besar meskipun paling rendah. Ini menunjukkan pemerintah sikap dan pernyataan menjadi pusatnya.

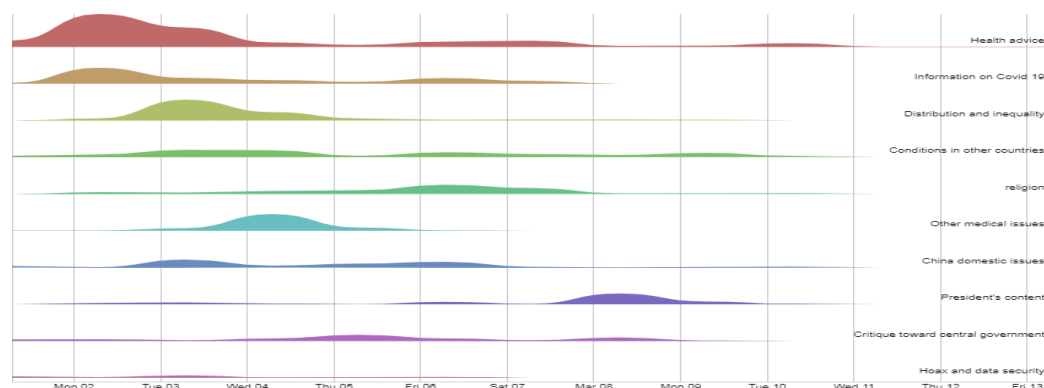


Figure 4. Issues related to Covid-19 on Twitter March 2020

Berdasarkan grafik area di atas, konten itu mengkritisi kebijakan pemerintah pusat sebelumnya jenis konten lainnya dan paling banyak dibagikan di paling awal sebelum pengumuman Covid-19. Hal ini menunjukkan tekanan publik dan keprihatinan atas sikap pemerintah dipengaruhi sebelum kasus tersebut diumumkan. Pada hari berikutnya, peningkatan kesehatan konten nasihat dan informasinya tersebar luas bersama. Satu hari setelah pengumuman. Kasus pertama di Indonesia, Twitter punya banyak konten mengenai sulitnya akses pelayanan kesehatan dan APD, diikuti oleh berbagai spekulasi tentang kondisi Covid-19 di China dan Indonesia sikap ambigu pemerintah terhadap Cina wisatawan dan kondisi di negara lain, dan penyebaran identitas pribadi pasien. Di Keesokan harinya, Twitter diramaikan dengan konten membandingkan masalah kesehatan lainnya seperti demam berdarah, influenza, kesehatan perokok, dan lain-lain. Pada tanggal 7 Maret, tanggapan dari pemuka agama menjadi perhatian. Namun, Konten dari Twitter presiden baru akun dibagikan secara luas pada 9 Maret 2020. Pada minggu kedua bulan Juni, larangan masuk dan keluar dari wilayah itu dihapuskan dalam bentuk kebijakan pemerintah terkait pelonggaran PSBB dapat diartikan protokol kesehatan yang diterapkan di awal musim mudik Lebaran di minggu kedua bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni adalah sesuatu yang berlebihan. Akibatnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menurun.

Pada 9 April, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi di Konteks Pencegahan Penyebaran Virus Corona Penyakit 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Transportasi Iklan Sementara. Namun, dalam implikasinya, itu menciptakan kebingungan di komunitas: apakah online ojek dapat mengangkut penumpang seperti yang mereka miliki pernah. Peraturan ini diikuti oleh Gubernur DKI Peraturan No.33/2020 yang diberlakukan pada bulan April 10 Januari 2020, dengan memperbolehkan kendaraan roda dua saja mengangkut penumpang jika pengemudi dan penumpang memilikinya alamat rumah yang sama. Ini membingungkan sekitar 1 juta driver ojek online di Jabodetabek (Jabodetabek) yang beroperasi di DKI dan sekitarnya banyak pekerja atau penduduk yang sebelumnya biasa menggunakan jasa ojek online di Jakarta. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 14 April 2020, pihak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan ojek online kembali mengangkut penumpang di wilayah yang berlaku PSBB.

Kebijakan Kementerian Perhubungan dianggap bertentangan dengan Kementerian Kesehatan Kebijakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB untuk Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa ojek online hanya dapat beroperasi untuk mengangkut barang, bukan orang. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak khususnya driver ojek online, untuk dapat mengangkut penumpang, jelas melanggar inti dari jarak fisik. Kementerian Perhubungan juga melarang kegiatan mudik mulai tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020. Aturan ini berlaku untuk semua moda transportasi darat dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya berupa denda terpaksa memundurkan kendaraan yang mencoba keluar wilayah PSBB seperti Jabodetabek atau sanksi pidana dan denda Rp 100 juta. Tapi itu tidak berlangsung lama, peraturan itu kemudian diubah, dan semua mode transportasi dapat kembali beroperasi pada 7 Mei 2020, tetapi dengan kriteria terbatas. Demikian juga dengan larangan mudik (keluar masuk suatu daerah) berakhir pada 7 Juni dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) No.7 Tahun 2020 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggantikan Surat Edaran No 5.

Kompleksitas

Upaya pencegahan dan penanganan pandemi adalah dihadapkan pada berbagai kepentingan strategis dan praktis dari berbagai elemen dalam negeri: pembangunan program dari pemerintah, kepentingan bisnis pengusaha, kepentingan politik dari politik partai dan pimpinannya; lemahnya koordinasi antara institusi; dan yang lebih penting, tingkat publik kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang kurang disiplin. perekonomian Indonesia pertumbuhan yang mengalami kontraksi sebesar 2,972% dibandingkan dengan triwulan pertama (y-o-y) tahun 2019 dengan gambar yang akan memburuk, telah mendorong Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Juni 2020 untuk membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan membentuk Satgas untuk Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Koordinasi Menteri Perekonomian melalui Kepresidenan Peraturan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Nasional Pemulihan ekonomi.

Rasionalitas penanganan pandemi di bawah Menteri Koordinator untuk Ekonomi terlihat tepat mengingat di triwulan kedua yang dialami perekonomian Indonesia kontraksi terparah sebesar 5,93% (y-o-y). Karena itu, meskipun dalam beberapa kesempatan Presiden mengatakan bahwa "kesehatan masyarakat" adalah prioritas, dalam praktek di bidang tampak bahwa kegiatan ekonomi-bisnis merupakan kegiatan utama, dan protokol kesehatan berperan peran pendukung dalam kegiatan tersebut. Peningkatan dalam jumlah pengangguran sebesar 3,7 juta orang serta peningkatan persentase orang di bawah garis kemiskinan menjadi hal yang menakutkan hantu, yang jika tidak dihentikan bisa semakin besar dan memiliki dampak yang lebih mengerikan. Selain itu, perhatian besar terhadap ekonomi tidak hanya untuk melindungi kehidupan orang tetapi cerminan kepentingan elite dalam pemerintahan dan partai politik yang memiliki bisnis serta buzzers yang merupakan klien dari tokoh-tokoh tersebut.

Kekhawatiran akan pandemi Covid-19 berubah menjadi resesi dan berlanjut di Krisis ekonomi telah menyebabkan kepanikan para petinggi pejabat dicerminkan oleh Menko untuk Urusan Ekonomi menanggapi kebijakan lokal. Seperti, setelah Gubernur DKI mengumumkan dirinya akan "menarik rem darurat" pada 10 September. Kekhawatiran para tokoh ditanggapi dengan kepanikan kelompok elit melalui media sosial yang mengecam kebijakan, yang mengakibatkan respon negatif dari pasar dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jatuhnya IHSG menandakan akan segera terjadi resesi ekonomi. Setelah satu hari mengalami IHSG mengalami penurunan, pada hari Senin indeks mengalami kenaikan yang menimbulkan pertanyaan. Benarkah pasar itu dikontrak karena pelaksanaan Jakarta PSBB? Sebuah kondisi ekonomi yang sangat sensitif terhadap wacana publik dikatakan sebagai narasi ekonomi. Selanjutnya, pernyataan pada penarikan rem darurat, karena peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air kapital, ditanggapi lantang di media sosial yang menunjukkan sisa-sisa pertempuran politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019.

Upaya percepatan tersebut penanganan Covid-19 seringkali diwarnai dengan emosi berlama-lama di arena politik (Shiller, 2020). Kepala BNPB mencoba untuk mengkonfirmasi selama perumusan ini Kebijakan PSBB yang tidak disebutkan Gubernur kata "PSBB Total" untuk DKI Jakarta. Ternyata bahwa setelah ditelusuri, muncul istilah "PSBB Total" di media massa. Belakangan ini sering terjadi tidak memadai dalam menginformasikan sesuatu karena persaingan waktu dengan media sosial. Kelemahan ini membuat media sering terjebak menggunakan istilah-istilah yang ada belum tentu tepat dan seakurat fakta yang sebenarnya. Pada di sisi lain, isu yang sudah menjadi viral di media sosial diperparah dengan relatif rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat.

Masalah lain yang sangat mendasar adalah masalah negara ketidaksiapan institusi dalam penanganannya dia. Lemahnya informasi dan koordinasi antar institusi telah menyebabkan lebih dari 100 dokter dan tenaga medis meninggal akibat kekurangan tenaga medis alat pelindung diri dan perlengkapannya. Pengadaan alat kesehatan yang harus dilakukan dengan cepat terhambat oleh berbagai prosedur birokrasi yang tidak diselesaikan dengan cekatan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Begitu juga dengan data dan informasi yang seringkali berbeda antar lembaga yang dimilikinya mengakibatkan kelambanan dalam penanganan. Secara spiritual, medis personel telah menyampaikan kelelahan dalam berurusan dengan pandemi sejak dua bulan pertama ini insiden meledak dengan alasan bahwa mereka telah lama meninggalkan keluarga mereka berjuang untuk kesehatan pasien mereka. Namun, apresiasi insentif untuk tenaga medis yang dijanjikan oleh pemerintah saja tiga bulan kemudian bisa dicairkan dan itu pun sudah masuk proses pembayaran secara angsuran.

Orang juga merasa lelah dan penat sejak PSBB santai di bulan Juni. Tempat wisata digerebek untuk curhat kebosanan di rumah dan untuk rekreasi. Sejak ini waktu, perilaku kepatuhan masyarakat terhadap kesehatan protokol mulai melonggarkan seiring dengan melonggarnya kontrol dan penegakan hukum dari pihak berwenang terhadap pelanggar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penurunan tersebut dalam tingkat kepatuhan publik adalah karena kebingungan atas berbagai kebijakan dari pemerintah, banyak yang sulit dipahami serta

perilaku elit lokal yang tidak memberikan kebaikan contoh, seperti membawa anak-anak mereka pesta pernikahan dengan menggelar konser musik dangdut atau tokoh politik yang mengajak massa untuk bergabung dengan mereka terlibat aktif dalam Pilkada (pilkada).

Selama pandemi saat ini, hoax juga menyebar, terutama yang terjadi di media sosial media. Kebijakan pemerintah cenderung membatasi informasi pelaporan ancaman Covid-19, baik di rumah maupun di rumah luar negeri. Media sosial dalam banyak hal telah menggantikan peran media massa, tetapi dalam kehidupan nyata itu adalah penting sarana untuk menciptakan berbagai kegemparan. Di samping itu memperparah perbedaan pandangan politik terkait terhadap suatu kebijakan, media sosial juga menjadi sarana promosi bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkannya situasi pandemi untuk kepentingan ekonomi.

Beberapa virus yang mengganggu protokol kesehatan adalah masalah bahwa rumah sakit dapat dengan mudah memvonis pasien yang meninggal karena terinfeksi akibat Covid-19. Itu rumah sakit dicurigai mencari keuntungan/mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 200 juta rupiah untuk pengobatan pasien Covid-19 dan 350 juta rupiah jika pasien meninggal. Ketidakpercayaan publik meningkat ketika seorang anggota keluarga meninggal sementara keluarganya berkeyakinan bahwa yang bersangkutan tidak terpengaruh oleh Covid-19 mengambil paksa jenazah dan mau dimakamkan secara normal sesuai dengan tradisi masyarakat yang bersangkutan di berbagai tempat seperti Manado, Makassar, Surabaya, Madura, Batam, Bekasi, dan Lombok. Data milik keluarga dialirkan melalui media sosial untuk menghadapi pernyataan rumah sakit. Fakta ini membuktikan adanya ketidakpercayaan pada masyarakat Indonesia masih tinggi seperti hasil penelitian mengenai level individu dan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan (Fahmi et al, 2019).

Upaya pencegahan penyebaran dan penanganannya pandemi kemudian dihadapkan dengan penerbitan kebijakan yang dilematis, yakni mampu melarang pelaksanaan 3.000 lokal dan regional pemilihan umum (pilkades) namun tetap berjalan serentak Pilkada Desember 2020. Meski banyak telah dikritik oleh beberapa pihak, politik keputusan pemerintah menunjukkan bahwa telah ada banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama masa pendaftaran dan awal tahun kampanye calon kepala daerah.

Kemenduaan

Upaya penanganan penyebaran Covid-19 dihadapkan pada beberapa dikotomi yang kontras: mengutamakan kesehatan atau menjaga kelestariannya kegiatan ekonomi; sesuai protokol kesehatan atau mengutamakan politik yang sudah menjadi nafas pembangunan; mengutamakan kepentingan warga negarabdalam suatu wilayah atau kepentingan nasional. Negara-negara yang terkunci seperti Cina, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Italia dapat dengan cepat mengurangi jumlah penyebarannya. COVID-19. Namun, proyek yang sukses ini tidak mungkin bagi pemerintah Indonesia. Karena anggaran negara yang terbatas, tidak mungkin untuk menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan orang lain selama periode penguncian. Kebijakan yang diambil oleh provinsi pemerintah tidak sedikit yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Begitu juga dengan kebijakan diambil oleh pemerintah daerah sering dipertimbangkan buruk oleh pemerintah provinsi dan pusat. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta pada awal April 2020 yang melarang kendaraan bermotor roda dua dari menarik penumpang, membatasi pekerjaan kantor jam, penutupan toko dan tempat hiburan berdampak ekonomi yang sangat besar sehingga banyak orang berteriak untuk segera dibuka kembali. Pengurangan dalam kapasitas operasional Trans Jakarta dan MRT telah menciptakan penumpang penuh dan kemudian mengakibatkan kegagalan melaksanakan salah satu prinsip utama kesehatan protokol “menjaga jarak”, dan sebaliknya. PT Kebijakan KAI untuk mengurangi jam operasional dan jumlah gerbong commuter line berpengaruh antrian panjang yang ternyata menyebabkan produktivitas karyawan di tempat kerja menurun drastis. Provinsi pemerintah juga menghadapi dilema yang sama dengan meningkatnya jumlah kasus positif yang terinfeksi virus mematikan ini melalui penegakan disiplin yang ketat dalam mematuhi protokol kesehatan atau mengizinkan orang bekerja untuk makan.

Kasus ambiguitas di area yang menarik untuk dibicarakan terjadi di Jawa Timur yaitu lintas perselisihan antara Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya terkait lonjakan tersebut positif kasus Covid-19 di Surabaya dan upaya penanggulangannya mereka. Pemerintah Surabaya berupaya membatasi kendaraan masuk dari luar bagaimanapun, milik Gubernur tanggapan sebaliknya, mengharapakan koordinasi dengan provinsi mengenai pembatasan ini kendaraan. Ketidakepakatan antara pemerintah ini tercermin dalam beberapa kasus seperti PT HM Pabrik rokok Sampoerna dilaporkan baru belasan kasus positif. Paralel kurva korona positif kasus meningkat secara signifikan di Surabaya daerah tersebut merupakan zona hitam.

Transformasi Sosial

Ada kebiasaan baru bagi manusia setelahnya Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Itu artinya manusia adalah mengubah kebiasaan dan sikap mereka dan dalam ilmu sosial disebut sebagai transformasi sosial. Struktur sosial mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya (Kastil, 2003; Maton, 2000). Perubahan dalam masyarakat menyebabkan perubahan dalam lingkungan yang diduga sebagai penyebab munculnya Virus Corona di China (Feola, 2015). Mengubah itu terjadi di lingkungan akan membawa perubahan kembali kepada masyarakat. Infrastruktur–jalan, kereta api, listrik, gas, air, broadband–biasanya dikonseptualisasikan sebagai 'besar', luas, dan agak sistem tahan lama yang saling ketergantungan dengan transformasi masyarakat (Cass et al, 2018). Perubahan lingkungan global memiliki andil besar dalam menciptakan transformasi sosial mengubah struktur sosial. perubahan membawa masyarakat transformasi. Jejaring sosial berkontribusi pada adaptasi dan transformasi sosial (Barnes et al, 2017; Casey, 2018). Mengenai penyakit pandemi, setidaknya singkatnya penelitian, ada peningkatan kekhawatiran pikiran masyarakat menyebabkan situasi pandemi pada minggu ketiga.

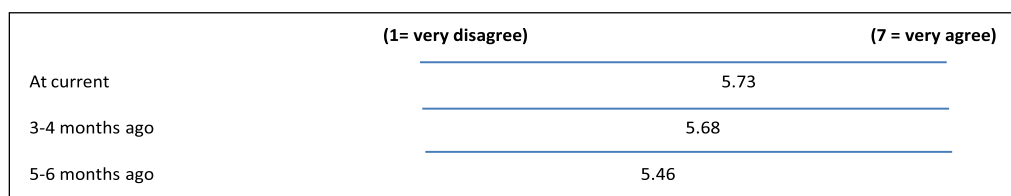


Figure 5: Worry to be infected by Covid-19 (n = 969)

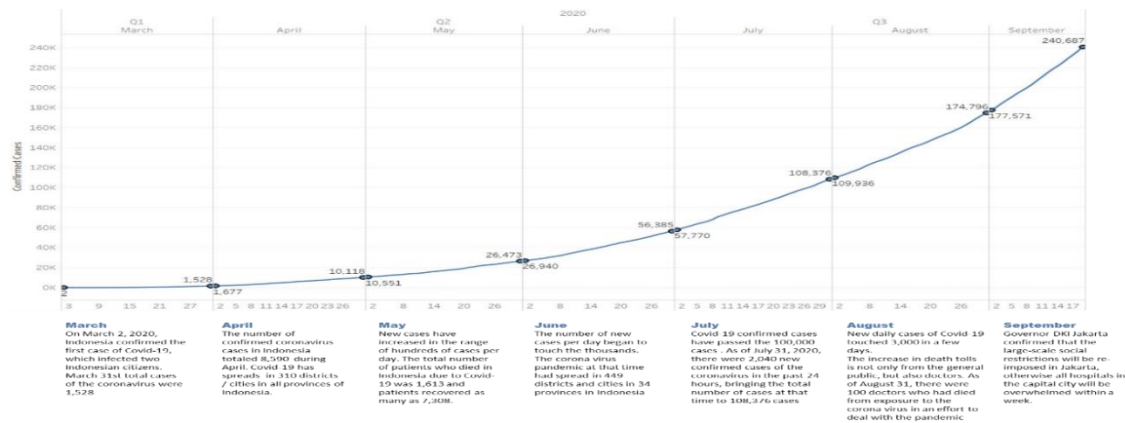


Figure 6: The First Seven Months of Outbreak

Pembahasan

Era VUCA saat ini menyebabkan institusi, elite tokoh dan masyarakat tampaknya masih belum selaras menuju transformasi sosial seperti yang diyakini solusi hidup damai sesuai protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 dapat ditekan/belum ada peningkatan. Namun, harapan banyak pihak sebagaimana disampaikan Presiden pada Mei lalu masih jauh dari harapan. Tren meningkat. Kasus Covid-19 terus meningkat dan tidak menurun seperti yang terjadi di negara-negara lain. Selanjutnya, “masyarakat akhirnya harus beradaptasi. dengan hal yang paling penting adalah penyesuaian aspek kelembagaan sehingga transformasi dapat berjalan lancar” (Feola, 2015). Pendapat ini sepertinya tidak cocok dengan kondisi pandemi di Indonesia. Era VUCA saat ini menyebabkan institusi, elite tokoh dan masyarakat tampaknya masih belum selaras menuju transformasi sosial seperti yang diyakini solusi hidup damai sesuai protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 dapat ditekan/belum ada peningkatan. Namun, harapan banyak pihak sebagaimana disampaikan Presiden pada Mei lalu masih jauh dari harapan. Tren meningkat. Kasus Covid-19 terus meningkat dan tidak menurun seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Setelah tujuh bulan pandemi menyebar Indonesia, masyarakat mulai bosan, aparat mulai lelah (Tempo.co.id, Selasa, 13 Oktober 2020 17:22 WIB; Kompas TV Selasa, 13 Oktober 2020 17:22 WIB; Liputan 6, 03 Des 2020, 10:00 WIB), beban ekonomi semakin berat bagi masyarakat sehingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan dimulai untuk melonggarkan. Bahkan, Worley (2020) berpendapat bahwa kebesaran dampak pandemi Virus Corona bagi masyarakat warna menunjukkan bahwa terlalu banyak kepemimpinan kita, desain organisasi, dan penelitian perubahan telah miring diskusi jauh dari realitas tidak nyaman. Di dalam. Faktanya, Worley (2020) berpendapat bahwa dampak terbesar dari pandemi Virus Corona terlalu banyak kepemimpinan, organisasi yang rumit, sehingga mengganggu diskusi dari realitas yang tidak nyaman. Itu terjadi di Indonesia, perhatian masyarakat terhadap penyakit ini pecah menjadi pudar dan telah terjadi ledakan di jumlah orang yang terjangkit wabah hingga lebih dari 1000 kasus hampir setiap hari sejak pertengahan Januari 2023. Di sisi lain, sudah jelas pemerintah ragu-ragu dan gugup tentang Fakta bahwa wabah penyakit ini membuat berbagai kebijakan tidak efektif.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melonjak ke konsekuensi VUCA yang membangun situasi semakin fluktuatif, ketidakpastian, kompleks dan kemenduaan. Tidak ada pilihan kebijakan publik yang mudah untuk membimbing orang-orang dalam transformasi sosial menjadi peduli dengan protokol kesehatan. De Roo (2017) menyebutkan itu sebagai "dunia menjadi", yang merupakan bentuk dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kompleksitas yang tinggi dalam masyarakat. Lingkungan sosial tidak kondusif untuk memfasilitasi masyarakat yang hidup dalam normal baru. Itu saran untuk meningkatkan kelincahan, mengelola yang besar dan baik informasi, restrukturisasi kelembagaan dan mengembangkan beberapa percobaan tidak dapat diterapkan dalam hal ini musim pandemic (Bennett et al, 2014). Kompleksitas yang terjadi tidak memberikan jaminan transformasi sosial itu terkait protokol kesehatan akan menjadi hal baru kebiasaan seperti yang disebutkan dalam konsep normal baru. Dia juga rekomendasi dari Aura tidak dapat diterapkan dengan baik (Codreanu, 2016). Ada beberapa yang kurang soliditas sosial dari masyarakat dan aparat pemerintah menghadapi Covid-19. Mereka berarti bahwa tantangan nyata untuk mengubah masyarakat untuk hidup damai tanpa khawatir tentang ancaman Virus Corona. Namun, optimisme mulai muncul ketika vaksin telah, meski sangat jumlah terbatas dan tanpa jaminan ratusan efektivitas persen. Selain itu, kami percaya itu kepedulian sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab adalah petunjuk untuk mencapai normal baru. Pelajaran lanjutan diperlukan untuk mensintesis kesulitan untuk membuat solusi yang lebih baik dan mengembangkan mempertajam teoritis kerangka.

References

- Azis, A., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2020). Strengthening young generation characters in the disruption era through the internalization of Wayang Golek values. *Sosiohumaniora*, 22(3), 356-364. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.26162>.
- Barnes, M. L., Bodin, Ö., Guerrero, A. M., McAllister, R. R., Alexander, S. M., & Robins, G. (2017). The social structural foundations of adaptation and transformation in social-ecological systems. *Ecology and Society*, 22(4). <http://doi:10.5751/ES-09769-220416>.
- Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. *Business horizons*, 57(3), 311-317. <http://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.001>.
- Bird, R. C. (2018). VUCA and the Legal Environment of Business. University of Connecticut School of Business Research Paper, (18-09). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3117932>
- Boullier, D. (2017). Big Data Challenge for Social Sciences.
- Casey, G.W. (2018). Leading in a Vuca World . Johnson Cornell St George College Business.
- Cass, N., Schwanen, T., & Shove, E. (2018). Infrastructures, intersections and societal transformations. *Technological Forecasting and Social Change*, 137, 160-167. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.039>.
- Castells, M. (2010) *The Rise of the Network Society*, Second edition. UK: Wiley & Blackwel.

- Castles, S. (2003). Towards a sociology of forced migration and social transformation. *sociology*, 37(1), 13-34. <https://doi.org/10.1177/0038038503037001384>
- Codreanu, A. (2016). A VUCA action framework for a VUCA environment. *Leadership challenges and solutions. Journal of Defense Resources Management (JoDRM)*, 7(2), 31-38.
- Dwivedi, Y.K., Kelly, Gerald, Janssen, Marijn, Rana, Nripendra P., Slade, Emma L., Clement, & Marc (2018). Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly. *Information Systems Frontiers*. 20, 419–423 <http://doi.org/10.1007/s10796-018-9848-5>.
- Devira Prastiwi, "Tembus 8.000 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Jadi 557.877 Kamis 3 Desember 2020", *Liputan6.com*. diakses 03 Des 2020, 16:20 WIB pada <https://www.liputan6.com/news/read/4424402/tembus-8000-orang-jumlah-pasien-covid-19-jadi-557877-kamis-3-desember-2020>.
- Fahmi, M., Panjaitan, N. A., Habibie, I., Siregar, A. Y., Amarullah, G., Rahma, & Sunjaya, D. K. (2019). Does your neighborhood protect you from being depressed? A study on social trust and depression in Indonesia. *BMC Public Health*, 19, 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7657-5>.
- Feola, G. (2015). Societal transformation in response to global environmental change: A review of emerging concepts. *Ambio*, 44(5), 376- 390. <http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0582-z>.
- González-Sanguino, C., Ausín, B., Castellanos, M. Á., Saiz, J., López-Gómez, A., Ugidos, C., & Muñoz, M. (2020). Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain. *Brain, behavior, and immunity*, 87, 172-176. <https://doi.10.1016/j.bbi.2020.05.040>.
- Maton, K. I. (2000). Making a difference: The social ecology of social transformation. *American Journal of Community Psychology*, 28(1), 25-57. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1005190312887>
- McNicol, G. (1999). *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1017/S1053837221000110>.
- Shintadewi, E. A., & Sumartias, S. (2017). Promosi Kesehatan HIV-AIDS dan Stigma Terhadap Pengguna Narkoba Suntik (PENASUN) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19(2), 128-139. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11403>.
- Umeozor, S. N. (2019). Information networking and its application in the digital era with illustration from the University of Port Harcourt Library. *International Journal of Knowledge Content Development & Technology*, 9(2).